

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), 1988.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2004.
- Hamidi, J, *Hukum Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia), 2013.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
- H.M.Galang Asmara, AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: Pustaka Bangsa), 2020.
- Koerniatmanto, Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1994.
- LAN RI, *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: Lan Jakarta), 2016.
- Malthus, Thomas, *Ledakan Penduduk Dunia Prinsip-Prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya*, (Bandung: Nuansa Cendikia), 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Patiro, Yopie Morya Immanue, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Keni Media), 2012.
- Rahardjo, Satdjipto *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2009.
- Santoso, Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press), 2003.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penulisan Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2020.

Sjahriful, Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1993.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: : studi kasus prita mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1986.

Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2004.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press), 2003.

Syahril, M.A.F, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara), 2023.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustak), 2008.

Tim Perumus NA RUU KEIMIGRASIAN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keimigrasian*. Jakarta. BPHN. 2022.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama), 2017.

Yudha, Bhakti, *Hukum Internasional*, (Bandung: Bunga Rampai), 2003.

Berita dan Media Cetak

Saut Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*. (Majalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia, 2016).

Jurnal

- Aulia, A. D., & Sulistyowati, T. (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Wna. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10525>
- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508-523.
- Emilia, L., & Nadirah, I. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara). *UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.
- Fathony, F. (2025). Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Imigrasi: Studi Kasus Indonesia dan Praktik Internasional. *Jurnal Hukum LexGeneralis*, 6(1). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/839>
- Hasan, A. (2015). Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 5–13.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–149.
- Jatmiko, S., & Hartanto. (2023). Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara). *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 47–64.
- Kurniawati, R., Mulyadi, A., & Agustanti, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(Mei), 151–162.

- Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume5, Nomor 2, Tahun 2018.
- Pratiwi, A. D., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusa, 6(1), 1589–1601.
- Punusingon, R. R., Lumenta, A. S. M., & Rindengan, Y. D. Y. (2017). Animasi Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Teknik Informatika, 12(1), 8.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 179-197.
- Santoso, Topo. (2020). Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya. Jurnal Hukum Pidana &Kriminologi, 1(1), 20.
- Shinta, Agustina. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-masalah Hukum, vol. 44, no. 4, pp 503-510.
- Sutria, D. (2019). Implementasi Metode Batu Pijar Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Siswa Sd Negeri 47 Kota Jambi. Jurnal Pesona Dasar, 7(2), 1–9.

Internet

- Arifianto , Iwan. 2023. “WNA Asal Bangladesh Merengek Minta Damai Setelah Sebar Konten Asusila Wanita Semarang di Facebook”
<https://jateng.tribunnews.com/2023/07/12/wna-asal-bangladesh-merengek-minta-damai-setelah-sebar-konten-asusila-wanita-semarang-di-facebook>, diakses pada 30 Desember 2024.

- Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online, 10 Maret 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online> diakses tanggal 2 April 2025
- Amalia, Saviera. 2023. “Kominfo Tangani Jutaan Konten Negatif, Terbanyak Judi Online”, <https://www.rri.co.id/iptek/365683/kominfo-tangani-jutaan-konten-negatif-terbanyak-judi-online>, diakses pada 24 Maret 2025.
- “Bagaimana Legalitas Izin Tinggal Orang Asing yang Jadi Narapidana di Indonesia? Ini Penjelasannya”. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/bagaimana-legalitas-izin-tinggal-orang-asing-yang-jadi-narapidana-di-indonesia-ini-penjelasannya, diakses pada tanggal 8 Maret 2025
- Direktorat Siber Polri, Tameng Hadapi Kejahatan Siber di Era Digital”Kementerian Komunikasi dan Digital, 27 September 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/direktorat-siber-polri-tameng-hadapi-kejahatan-siber-di-era-digital>, diakses tanggal 7 Maret 2025.
- Kejaksaan Republik Indonesia, <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker>, Diakses pada 23 Februari 2025
- Moch Umar, ” Terlibat Cybercrime, 40 Warga Asing di Semarang Terancam Dideportasi”, Gatra.com, <https://www.gatra.com/news-412117-internasional-terlibat-cybercrime-40-warga-asing-di-semarang-terancam-dideportasi.html>, diakses tanggal 25 Februari 2025
- Monavia Ayu Rizaty, Kemenkominfo Blokir 1,95 Juta Konten Pornografi di Internet, <https://dataindonesia.id/internet/detail/kemenkominfo-blokir-195-juta-konten-pornografi-di-internet>. Diakses pada 1 April 2025
- Rocham. 2024. “Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 3,6 juta konten negatif”, <https://www.antaranews.com/berita/4309007/kemenkominfo->

telah memblokir-lebih-dari-36-juta-konten-negatif, diakses pada 24 Maret 2025.

Buku Asing

Red F.M, *Staats-en Bestuursrecht Tekst en Materiaal Tweede Druk*. (Deventer: Kluwer), 2004.

Disertasi Doktor

Muhammad Indra. "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia". Universitas Padjajaran, 2008.

Skripsi

Lestari, Agnes Dwi. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta).
Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47747/19410294.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peraturan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelejen Keimigrasian.

Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang – Jawa Tengah 50126
Laman: www.imigrasi.go.id. Pos-el : kanwilditjenim.jateng@gmail.com

Nomor : WIM.13.UM.01.01-77
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Izin Penelitian an. Aulia Septiana Putri

10 Maret 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di tempat

Sehubungan dengan adanya surat permohonan penelitian dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dalam rangka dukungan kerja sama di bidang akademik dan pengabdian masyarakat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada pihak tersebut di bawah ini:

Nama : Aulia Septiana Putri
NIM : 11000121130224
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Asusila yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Kota Semarang Ditinjau dari Perspektif Hukum Keimigrasian

untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib yang berlaku pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.
2. Hasil/kesimpulan dari kegiatan tersebut agar dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Pembimbing Penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Is Edy Ekoputranto

Tembusan:

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang;
2. Pihak Yang Bersangkutan.